

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Gazali, Djoni S., dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Imaniyati, Neni Sri, dan Panji Adam Agus Putra. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 2005.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*. Bandung: Alumni, 2002.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, dan Lucky Nugroho. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Widhina Bakti Persada, 2021.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

- Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- Marbun, SF., dan Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Miru, Ahmad. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Miru, Ahmad, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahayu, Febby Mutiara. *Mengenal Uang*. Jakarta: Bumi Aksara, 2023.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Riswandi, Budi Agus. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Riswandi, Budi Agus. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Sriekaningsih, Ana. *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Jurnal

- Aini, Muthia Zahra Qurraatha. "Urgensi Pembentukan Aturan Induk Bagi QRIS Untuk Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Integrasi Transaksi ASEAN." *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 3, No. 1 (2026): 36–45. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v3i1.1525>.
- Almanaseer, Sufian Radwan. "The Relationship Between Financial Integration And

- Financial Stability: An Application Of Panel Smooth Transition Model." *International Journal of Professional Business Review* 8, No. 5 (2023): 1–22.
- Annisa, Nabila Nur, Leli Irwanah, Nur Isma Rosa, Cahya Dibah Al Adawiyah, Roro Ranggika, dan Syahadah Albaqiyatul Karimah. "Implementasi QRIS Metode Pembayaran Digital Pada Kualitas Peningkatan UMKM Di Masyarakat Desa Rancabungur." *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 1 (2024): 97–104. <https://doi.org/10.47776/praxis.v2i1.749>.
- Arif, Mhd Fakhrurrahman. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Hukum Tata Negara* 6, No. 2 (2023): 56–58.
- Ariyanto, Faghlaifi Naim, dan Adnan Qubbaja. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam E-Payment Berbasis QRIS." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, No. 1 (2025): 149–175. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art7>.
- Aswati, Wa Ode, dan Dea Ika Renalda. "Pengaruh Manfaat Dan Risiko Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9, No. 2 (2024): 555–569.
- Atmaja, Yustisiana Susila, dan Darminto Hartono Paulus. "Partisipasi Bank Indonesia dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 3 (2022): 285–296.
- Diane, Zulfi Zaini. "Integrasi Sistem Keuangan Di Asia Timur Dan Implikasinya Bagi Indonesia Terhadap Regulasi Perbankan." *Jurnal Hukum* 7, No. 2 (2010): 1–20.
- Farel, Muhammad A. "Revolusi Uang Dan Pembayaran: Dari Barter Ke Uang Digital." *Jurnal Ekonomi Digital* 1, No. 1 (2024): 1–7.

- Ferrando, Annalisa, Peter Hördahl, dan Elizaveta Krylova. "Measuring Financial Integration In The Euro Area." *ECB Occasional Paper Series* No. 14 (2004): 1–94.
- Handayani, Tri. "Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Transaksi Pembayaran Digital." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2 (2021): 200–215.
- Harianto, Dedi. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, No. 1 (2015): 143–147.
- Heriyadi, Hengki. "Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 11, No. 1 (2023): 36–44.
- Hokamah, Wesilatul, Sinta Fatmala Sari, Rini Puji Astuti, dan Sulfaunsilah. "Peran Aktif Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Melalui Sistem Pembayaran." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, No. 5 (2025): 214–220.
<https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.254>.
- Juwana, Hikmahanto. "Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Internasional* 1, No. 1 (2003): 1–10.
- Kristanty, Desy Natalia. "Tren Dan Tantangan Keamanan Bertransaksi Dengan QRIS Dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digital." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 5, No. 10 (2024): 3923–3933.
- Leksono, Nugrah, Putri Handayani, dan Poppy Fitrijanti Soeparan. "Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 4, No. 3 (2022): 1–15.

- Lestari, Made Irma. "Kesediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)." *Jurnal InFestasi* 19, No. 1 (2023): 39–51.
<https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19695>.
- Lintangsari, Nastiti Ninda, Nisaulfathona Hidayati, Yeni Purnamasari, Hilda Carolina, dan Wiangga Febranto Ramadhan. "Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, No. 1 (2018): 47–62.
- Muthiah, Aulia. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, No. 1 (2020): 64–75.
- Nugraheni, Destri Budi. "Kedudukan Hukum Uang Elektronik sebagai Alat Pembayaran yang Sah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, No. 2 (2019): 338–357.
- Nurtjahjo, Hendra. "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (*State Auxiliary Agencies*) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 35, No. 3 (2005): 275–292.
- Pamuji, Eko Adi Prasetyaning, dan Muhammad Iqbal Harisandy. "Analisis Yuridis Penggunaan QRIS sebagai Instrumen Pembayaran dalam Perspektif Hukum Perbankan." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5, No. 1 (2022): 44–58.
- Pinandito, Aryo, dan Raihan Fikri Brilliansyach. "Efisiensi Penggunaan QRIS Dengan Merchant Presented Mode Dalam Transaksi Pembayaran Non-Tunai." *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* 11, No. 4 (2024): 805–816.

<https://doi.org/10.25126/jtiik.1148570>.

- Putri, Nindi Anindiya. "Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) Untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran Di Kota Semarang." *Diponegoro Law Journal* 9, No. 2 (2020): 1689–1699.
- Putri, Nugrah Leksono Handayani. "Optimalisasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan." *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* 1, No. 3 (2023): 363–370. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i3.752>.
- Ramli, Rizal, dan Enny Sri Hartati. "Transformasi Digital Sistem Pembayaran Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 4, No. 1 (2020): 14–25.
- Rosadi, Sinta Dewi. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia." *Veritas et Justitia* 4, No. 1 (2018): 88–110.
- Silalahi, Purnama Ramadani, Khairina Tambunan, dan Tryana Ramadhany Batubara. "Dampak Penggunaan QRIS Terhadap Kepuasan Konsumen Sebagai Alat Transaksi." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 1, No. 2 (2022): 122–128.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, No. 3 (2019): 541–558.
- Suparno, Indriyati. "Kedudukan Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 17, No. 1 (2018): 22–35.

Tarantang, Jefry, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, dan Meidinah Munawaroh.

"Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia." *Al-Qardh: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, No. 1 (2019): 60–75.

Wijaya, Endra, dan Benny Djaja. "Kedudukan Hukum Peraturan Bank Indonesia dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, No. 1 (2022): 107–125.

Yunus, Nur Rohim, dan Annissa Rezki. "Penerapan Sanksi Administratif dalam Regulasi Sistem Pembayaran Digital di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 8, No. 1 (2020): 85–102.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Keuangan Inklusif.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/8/PADG/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

Dokumen Resmi dan Sumber Lainnya

Bank Indonesia. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital*. Jakarta: Bank Indonesia, 2019.

Bank Indonesia. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030: Mengakselerasi Ekonomi Digital Nasional untuk Generasi Mendatang*. Jakarta: Bank Indonesia, 2024.

Bank Indonesia. *Frequently Asked Questions QRIS*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020.

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. *Statistik Pengguna QRIS 2026*. Jakarta: ASPI, 2026. <https://www.aspi-indonesia.or.id>.

Artikel

Aditya Priyatna Darmawan dan Resa Eka Ayu Sartika., “QRIS Kini Bisa Dipakai untuk Belanja di 5 Negara Selain Indonesia, Mana Saja?” Kompas.com, diakses 22 Mei 2026,

<https://www.kompas.com/tren/read/2026/04/04/200000465/qris-kini-bisa-dipakai-untuk-belanja-di-5-negara-selain-indonesia-mana-saja?page=all#page2>.

Bank Indonesia, “Cara Membuat QRIS *All Payment* untuk Usaha,” Bank Indonesia, diakses 26 April 2026, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/cara-membuat-QRIS.aspx>

Bank Indonesia, “*Frequently Asked Questions (FAQ) BI-Fast*,” Bank Indonesia, diakses 26 April 2026, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Documents/FAQ_SP_2327021.pdf

Fandy. “Sejarah Perkembangan Uang di Dunia dan Indonesia.” Gramedia, diakses 22 Februari 2026, <https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-uang/>.

Fauzi, Hiqbal. “Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia: Dari Awal Hingga Kini.” Nevacloud, diakses 23 Februari 2026, https://nevacloud.com/blog/sejarah-dan-perkembangan-internet-di-indonesia/#Bagian_1_Awal_Mula_Internet_di_Dunia_dan_Indonesia_1969-1994

Ismail, Ibnu. “Pengertian Alat Pembayaran dan Jenis-jenisnya” Accurate.id., diakses 26 April 2026, <https://accurate.id/aplikasi-kasir/alat-pembayaran/>.

K., Amira “Sejarah Internet hingga Perkembangannya di Indonesia Saat Ini” Gramedia, Diakses 23 Februari 2026, https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-internet/#a_1969_-_Internet_dicetuskan.

Kresnoadi. “Bagaimana Asal-Usul Terciptanya Uang?” Ruangguru, diakses 22

Februari 2026, <https://www.ruangguru.com/blog/bagaimana-asal-usul-terciptanya-uang>. Diakses 22 Februari 2026.

QRIS Interactive. "Statistik Penipuan QR Code di Indonesia: Fakta Mengejutkan & Cara Menghindarinya." Diakses 20 Mei 2026. https://qris.interactive.co.id/homepage/blog_detail.php?lang=en&page=MTc5-statistik-penipuan-qr-code-di-indonesia.

Rohman Juani, "Penggunaan Uang Jaminan Lelang berupa Uang Elektronik Berbasis Server." Kementerian Keuangan, diakses pada 1 Mei 2026 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15691/Penggunaan-Uang-Jaminan-Lelang-berupa-Uang-Elektronik-Berbasis-Server.html> .1

Santoso, Andrew. "Cemumuah, Manfaat Transaksi QRIS bagi Pelanggan dan Merchant," Kompasiana, diakses 26 April 2026, <https://www.kompasiana.com/andrew92373/64c8bbd54add-ee27d7389c12/cemumuah-manfaat-transaksi-QRIS-bagi-pelanggan-dan-merchant>,

Vincencia Januaria Molo, "Sejarah Uang: dari Barter hingga Mata Uang Digital," Detik Bali, diakses 22 Februari 2026, <https://www.detik.com/bali/berita/d-7581735/sejarah-uang-dari-barter-hingga-mata-uang-digital>.